

BAB II

LATAR BELAKANG LAHIRNYA PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)

A. Situasi nasional yang melatarbelakangi terbentuknya PRD

Sejarah mencatat Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto mulai membangun kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1966. Ini terhitung sejak Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret 1966 dari Presiden Soekarno yang dikenal dengan istilah ‘Supersemar’. Tampilnya Soeharto ke dalam pentas politik nasional juga tidak bisa dipisahkan dengan partisipasi dan kontribusi elemen mahasiswa angkatan 1966. Hal ini sejalan karena memang kaum minoritas ini terdiri daripada kalangan intelektual dan mahasiswa yang diperkirakan akan bersungguh-sungguh dalam berbuat untuk kepentingan rakyat karena adanya sifat-sifat mereka yang unggul misalnya; rasionalitas, penguasaan ilmu pengetahuan, modernitas dan keterlibatan sosial.¹

Di luar daripada itu, Jenderal Soeharto juga memang memiliki keberuntungan politik. Hal ini dilihat ketika sosoknya yang tampil spontanitas di berbagai media ketika meletusnya peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Ibarat seorang pahlawan, Soeharto hadir untuk menangani korban G30S yang terdiri dari para jenderal yang diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Selanjutnya dengan propaganda, lalu menuduh

¹ Francois Raillon, *Ideologi Politik Mahasiswa Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 333.

bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi aktor tunggal peristiwa G30S yang berujung stigmatisasi terhadap partai tersebut sebagai partai terlarang. Karena aksi dan penampilannya tersebut, Soeharto banyak mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang ketika Gestapu meletus merasakan ketakutan. momentum ini pula yang nantinya akan memuluskan perjalanan Soeharto menuju kursi kepresidenan.

Pemerintahan Orde Baru yang bertumpu pada kekuatan Birokrasi dan Militer selama lebih dari tiga dasawarsa berhasil membangun kekuatan dan kekuasaan yang hampir tak terbatas. Hegemoni eksekutif telah menjadi dominasi besar yang represif, tak terkendali dan melampaui kewenangan lembaga Legislatif dan Yudikatif. Hak-hak dasar partisipasi rakyat untuk berpolitik sangat dibatasi. Hakekat/esensi kemerdekaan yang adalah kebebasan untuk memilih dan menentukan jalannya kehidupan bernegara semakin jauh dari esensinya. Secara sistematis penguasa semakin mendominasi lapangan politik dengan cara-cara yang represif.²

Dalam kehidupan pemerintahan Orde Baru sangat tidak menghargai perbedaan pendapat, kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat. Suara-suara kritis kebanyakan dijawab dengan intimidasi dan pemenjaraan. Pembredelan dilakukan terhadap Koran-koran, majalah, buku-buku dan media cetak lain yang dianggap menentang pemerintahan. Semua logika

² Manifesto Partai Rakyat Demokratik dalam Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), *Demo Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk* (tidak diterbitkan), 1999.

kekuasaan itu dilancarkan, diterapkan dan dipelihara dengan tujuan menjaga stabilitas akumulasi modal.

Negara Orde Baru adalah entitas yang telah mulai membangun karakter politiknya semenjak awal berdirinya. Dalam kenyataan politik kontemporer, bangunan negara ini sudah termapankan karena terdukung atas tiga hal yaitu;³

Pertama, rejimentasi yang diprogramkan Orde Baru tidak memberi batas toleransi maksimal bagi upaya pembesaran sosok negara. Negara tidak merasa perlu mengakomodasi kepentingan-kepentingan partisipatoris (rakyatnya). Negara memiliki agenda dan kepentingan sendiri, yang celakanya tidak sejalan dengan agenda dan kepentingan rakyatnya.

Kedua, dalam tubuh negara terbangun sentralisasi politik yang tegas. Kekuasaan negara memusat pada segelintir aktor, bahkan pada satu puncak. Sentralisasi ini berhasil membangun model manajemen konflik politik yang efektif dalam ranah mempertahankan soliditas rejim dan memformat struktur politik masyarakat sejalan dengan kepentingan Negara.

Ketiga, politik Orde Baru telah menempatkan ketakutan dan ketertekanan sebagai aset. Rakyat menjadi aset negara dalam posisinya sebagai objek politik, pemberi legitimasi, dan bahkan bangunan utama bagi pendirian tembok besar yang diberi nama Negara Orde Baru.

Dalam keadaan sosok negara yang sudah termapankan itu, maka wajar saja apabila kecenderungan represi Negara tak terelakan akan sulit

³ Catatan lebih lengkap, lihat: Eep Saefulloh Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 8-9.

dibendung. Untuk lebih jelasnya akan dideskripsikan beberapa kebijakan-kebijakan represif yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk melangengkan *status quo-nya*.

1. Pembatasan Hak Politik Rakyat

Pemerintahan Orde Baru mengklaim bahwa gagalnya tatanan kehidupan bernegara secara mutlak disebabkan oleh sistem politik Demokrasi Parlemerter pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi Parlemerter menganut sistem multi partai dimana kebebasan ideologi politik dari berbagai Partai Politik punya kontribusi dalam menentukan jalannya kehidupan bernegara. Hal ini lah yang dipandang oleh pemerintah Orde Baru sebagai suatu kesalahan besar. Konflik dan disintegrasi bangsa dipastikan terjadi akibat terlalu dibukanya partisipasi politik yang luas. Dengan demikian dalam rangka mensukseskan retorika Pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Orde Baru maka perlu diberlakukannya penataan ulang kembali kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek politik guna mencapai Stabilitas Nasional.

Penggabungan (Fusi) Partai merupakan tahapan pertama kebijakan yang dicanangkan Pemerintah guna meminimalisir jumlah Partai Politik. Kebijakan ini dilegitimasi dalam UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.⁴ Adapun implementasi dari kebijakan ini yaitu hilangnya komunikasi politik antara Partai Politik dan para pendukungnya.

⁴ Lebih lengkapnya lihat, Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN), *kumpulan Undang-undang Hukum dan Politik*, Jakarta, Tidak diterbitkan, 1985 h. 69.

Partai Politik dan para pendukungnya hanya bisa dipertemukan dalam suatu momentum Pemilihan Umum. Inilah yang disebut dengan Kebijakan Massa Mengambang.

Terasingnya masyarakat dari politik tersebut pada akhirnya membuat kran politik tidak mengalir, hal ini dikarenakan aspirasi masyarakat yang tidak bisa disalurkan secara leluasa. Dengan demikian semuanya berujung dengan aksi protes yang tidak terelakan lagi. Aksi protes ini disuarakan oleh kelompok massa mengambang yang kecewa akibat perlakuan politik yang tidak adil atau ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan pemerintah, baik pusat maupun daerah.⁵

Tidak cukup sampai disitu, melalui UU No. 8 Tahun 1985 pemerintah Orde Baru juga melakukan intervensi terhadap keberadaan Organisasi-organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Bentuk intervensi tersebut yaitu dengan cara menyeragamkan semua azas Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi azas tunggal Pancasila.⁶ Dalam konteks ini pemerintah memposisikan dirinya sebagai Pembina organisasi kemasyarakatan. Pemerintah memiliki otoritas untuk mengarahkan, menunjuk pengurus, membekukan dan bahkan membubarkan bila dianggap perlu.

Representasi Politisasi Ormas dan LSM adalah sesuatu yang baik bagi gerakan pro-demokrasi, dalam hal ini Negara harusnya menunjukkan sikap yang lapang dan akomodatif terhadap eksistensi serta aktivitas Ormas dan LSM itu sendiri. Namun, jauh dari yang diharapkan banyak kalangan,

⁵ Bagong Suyanto, dkk, *Gejolak Arus Bawah*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995), h. 5.

⁶ Lebih lengkapnya lihat, Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN), *op cit.*, h. 281

pemerintah Orde Baru ternyata masih konsisten dengan pendekatan keamanan dalam merespons dinamika dalam tubuh Ormas dan LSM. Bahkan, politisasi Ormas dan LSM pun dijawab dengan radikalisasi Negara. Ormas dan LSM pun akhirnya mengalami depolitisasi.

2. Depolitisasi Mahasiswa dan Kampus

Setelah peristiwa Malari pada tahun 1974, pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang berupa pembekuan Dewan Mahasiswa pada 28 Januari 1978,⁷ serta dicituskannya Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang masing-masing dicituskan pada tahun 1978 dan 1979.⁸ Adapun fungsi dari NKK yaitu untuk menata ulang dan meredefinisi kehidupan kampus secara mendasar, fungsional, dan bertahap. Sedangkan fungsi dari BKK yaitu sebagai badan yang bertugas membantu Rektor untuk merencanakan kegiatan kemahasiswaan.

Implementasi kebijakan NKK/BKK dan ketidakmampuan ormas formal untuk menjalankan aktivitas yang independen sangat membatasi dan mematikan dinamika politik kampus. Sepanjang awal dan sampai pertengahan 80-an, aktifitas kemahasiswaan berada pada titik terendah.

⁷ Instruksi Mendikbud No.1/U/1978 dan SK Mendikbud No.037/U/1979, yang menghapuskan Dewan Mahasiswa serta membatasi kegiatan kemahasiswaan hanya di bidang kesejahteraan, rekreasi, serta kegiatan-kegiatan akademik/intelektual.

⁸ SK Mendikbud No.0156/U/1978, NKK yang intinya melarang segala aktivitas politik dan mengekspresikannya di kampus, kecuali dalam bentuk diskusi politik yang bersifat akademis. Instruksi Ditjen Pendidikan Tinggi/002/DK/Inst/1978, yang meletakkan semua aktivitas kemahasiswaan dibawah pengawasan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan (PR III), dibantu PD III di tiap fakultas. SK tersebut melahirkan BKK, yang memberikan otoritas rector untuk sewaktu-waktu menunjuk atau mencopot struktur kepengurusan oleh mahasiswa.

Berubahnya orientasi mahasiswa terutama terhadap pekerjaan juga dituding sebagai pasifnya mahasiswa terhadap persoalan sosial dan politik.

Jadi di sisi lain NKK/BKK bukan semata-mata penyebab depolitisasi kampus. Efek dari perubahan sosial dan nilai-nilai baru tercermin dari keinginan untuk segera mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Jelaslah bahwa NKK/BKK dan perubahan orientasi merupakan dua hal penyebab depolitisasi kampus yang tidak dapat dipisahkan. Secara implisit NKK/BKK dimaksudkan untuk membuat mahasiswa lebih berpikir pragmatis-ekonomis daripada politis.

Selain itu, pada bidang penyelenggaraan tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan SK No. 0124 pada tahun 1979 yang mewajibkan diberlakukannya Sistem Kredit Semester (SKS). SKS merupakan mekanisme belajar mengajar terprogram secara intensif. Untuk jenjang S1 mahasiswa diwajibkan menyelesaikan studi pada setiap semester secara keseluruhan yang terdiri dari 8-12 Semester.

Ketatnya kewajiban akademik yang bersamaan dengan pembinaan kegiatan non-akademik mahasiswa memberikan pengaruh yang kuat bagi keterbatasan mahasiswa untuk melakukan aktivitas politik. Sebagian besar dari mahasiswa mau tidak mau terfokus untuk memanfaatkan sistem SKS untuk segera menyelesaikan studi dan memasuki lapangan kerja. Berbagai kebijakan ini jelas telah mengakibatkan redupnya dinamika gerakan mahasiswa dalam rentang waktu yang cukup panjang.

3. Represi Terhadap Pers

Dalam masa pemerintahannya yang cenderung otoriter, Orde Baru juga melakukan tindakan-tindakan yang berupa kontrol dan bahkan pengembirian terhadap keberadaan pers. Padahal secara jelas bahwa eksistensi pers merupakan kriteria Negara yang demokratis. Pers merupakan pilar demokrasi keempat dalam arti bahwa keberadaan pers sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Tercatat beberapa kebijakan represif pemerintah terhadap pers yaitu diantaranya Tempo, Editor, dan Tabloid Detik yang dibreidel pada tahun 1994 oleh Menteri Penerangan Harmoko.⁹ Sejumlah jurnalis kritis yang ditangkap diantaranya adalah Triagus Susanto yang seorang editor Kabar dari Pijar, juga Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Liston Siregar yang merupakan anggota Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) yang menerbitkan majalah Suara Independen.¹⁰ Ada pula Buletin Mitra Media terbitan Kalyanamitra yang dilarang terbit. Markas Yayasan Pijar (Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi) dan Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) digrebek aparat keamanan. Sejumlah aktivis AJI dipecat dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan mereka diharamkan untuk berkiprah di dunia pers.

Pada tahun 1996, harian Media Indonesia menghentikan edisi minggunya yang dikelola oleh mantan Jurnalis Tempo. Hal ini terjadi karena sang jurnalis yang memuat wawancara dengan Nurchlis Madjid yang

⁹ Miftahudin, *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*, (Jakarta: Desantara, 2004), h. 63.

¹⁰ *log.cit.*

menganjurkan agar Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampil sebagai oposisi, bukan partner dan koalisi Golkar dalam pemerintahan. Selain itu terdapat satu kasus yang paling fenomenal yaitu terbunuhnya Fuad Muhammad Syarifudin alias Udin. Udin adalah seorang wartawan harian Bernas Yogyakarta. Ia dianiaya hingga tewas diduga kuat karena tulisan-tulisannya yang memuat isu korupsi Pemda Bantul dan mengkritik Golkar. Hingga saat ini kasus tersebut tidak pernah terungkap siapa dalang dan pelakunya.

Secara garis besar tindakan-tindakan represif terhadap pers yang dilakukan pemerintah Orde Baru dapat digambarkan sebagai berikut; *Pertama*, kontrol preventif dan korektif terhadap kepemilikan institusi media, antara lain melalui pemberian SIT (yang kemudian dikenal dengan nama SIUPP) secara selektif berdasarkan kriteria politik. *Kedua*, kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku profesional (wartawan) melalui anggota PWI sebagai wadah tunggal. *Ketiga*, kontrol terhadap produk teks pemberitaan. *Keempat*, kontrol terhadap sumber daya antara lain monopoli kertas oleh penguasa. Dan *kelima*, kontrol terhadap akses pers yang berupa pencekalan terhadap tokoh-tokoh oposan tertentu untuk tidak ditampilkan dalam pemberitaan pers.¹¹

Dalam realitas tersebut terkesan bahwa adanya ketegangan antara negara dan eksistensi pers. Terdapat arus yang saling kontradiktif yaitu arus politisasi pers dan arus radikalisasi negara. Di satu sisi, pers semakin

¹¹ Dedy N. Hidayat, et.all, *Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya sebuah Hegemoni*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 6.

menonjol sebagai elemen yang kritis dan berani menolak proyek depolitisasi yang terus dijalankan oleh pemerintah Orde Baru. Di sisi lain pemerintah Orde Baru terlihat makin sensitif terhadap kritisisme yang berujung negara menjadi represif dan radikal.

4. Represi terhadap Masyarakat Sipil

Selama kepemimpinannya, pemerintah Orde Baru juga tercatat melakukan tindakan represi terhadap masyarakat sipil. Pemerintah Orde Baru banyak melakukan intimidasi terhadap tokoh-tokoh publik yang vokal dan kritis terhadap masalah-masalah sosial dan politik. Salah satu anggota MPR/DPR Sri Bintang Pamungkas dipecat karena beliau selalu vokal menentang Soeharto. Dari kalangan akademisi muncul nama Dr. Arif Budiman, salah satu staf pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Beliau dipecat dari profesinya karena bersifat kritis terhadap Soeharto.¹² PENCEKALAN juga terjadi terhadap seperti Pramodya Ananta Toer, Ali Sadikin dan Emha Ainun Najib. Mereka dilarang untuk berbicara dalam seminar-seminar mahasiswa.¹³

Dari kalangan aktivis mahasiswa, kasus yang paling terkenal adalah ditangkapnya Bambang Isti Nugroho, Bonar Tigor Naiposopos, dan Bambang Subono di Yogyakarta tahun 1990. Mereka dipenjara karena memegang dan mengedarkan novel karya Pramodya Ananta Toer dan diktat kuliah STF

¹² Miftahudin, *op.cit.*, h. 65.

¹³ Suharsih dan Ign K Mahendra, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Resist Book, 2007), h. 89.

Driyakara yang berjudul Sejarah Singkat *Marxisme-Leninisme* susunan Dr.Frans Magnis Suseno.¹⁴ Selain itu juga terdapat beberapa aktivis yang ditangkap menggunakan pasal penghinaan kepala negara. Mereka adalah Heri, Akhmadi pada tahun 1979, Lukman Hakim tahun 1981, Agus Salim tahun 1984, Andi Syahputra tahun 1995, Sri Bintang Pamungkas tahun 1996, dll.¹⁵

Masyarakat kecil pun ternyata mengalami tindakan represifitas dari pemerintah Orde Baru, misalnya pada tahun 1984 terjadi penggusuran tanah petani di Kedung Ombo.¹⁶ Ratusan kepala keluarga dipaksa harus meninggalkan lahan pertaniannya karena akan dijadikan proyek pembuatan waduk oleh pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah melakukan pendekatan yang baik kepada para petani yang sudah hidup bertahun-tahun di tempat itu, dan ketika tanahnya diambil para petani tidak diberi biaya ganti rugi yang memadai.

Selain itu, pemerintah Orde Baru juga sering melakukan tindakan-tindakan represif terhadap kaum buruh yang keberadaannya masih termarginalkan. Upah yang rendah dan kesejahteraan yang sulit didapat menjadikan buruh semakin terpuruk keadaannya. Berdasarkan kasus perburuhan yang terjadi, penyelesaian represif yang biasa dijalankan pemerintah yaitu, Pertama, penyelesaian parsial, yakni pemilik perusahaan

¹⁴ Suharsih dan Ign K Mahendra, *log cit.*

¹⁵ Sutoro Eko, *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*, (Yogyakarta: APMD Press, 2003), h.135.

¹⁶ Kisah lebih detil tentang kasus kedung Ombo lihat, Arief Budiman & Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, (Jakarta: Institut Studi Informasi, 2001), h. 1-50.

bersedia memenuhi tuntutan kaum buruh untuk menaikkan upah, tetapi efek sampingnya beberapa buruh yang dianggap kritis terpaksa harus di PHK.¹⁷ Kedua, penyelesaian perselisihan antara pemilik perusahaan dengan buruh sering bersifat sepihak dan cenderung merugikan kaum buruh.¹⁸ Ironisnya pemerintah tidak menjadi penengah yang baik dan bahkan menjadi aktor belakang pemilik perusahaan. Negara yang berdaulat dan atas dasar hukum, keadilan justru semakin terkesan menjadi barang langka bagi rakyat kecil yang seharusnya bisa berteduh dalam payung keadilan.

5. Kontroversi Pembangunan

Pembangunan yang bercorak birokratik dan teknokratik adalah model yang dipilih oleh pemerintah Orde Baru semenjak keberadaannya. Dalam model ini, pembangunan ditumpukan pada peranan birokrasi dan kelompok teknokrasi secara menonjol.¹⁹ Yang dipentingkan dan menjadi prioritas sebagai penggerak pembangunan adalah keahlian praktis untuk menggerakkan program-program pragmatis dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara cepat.

Pertumbuhan ekonomi makro Indonesia selama era kepemimpinan Orde Baru memang pesat dan konstan. Ekspor meningkat rata rata 9%

¹⁷ Lebih jauh lagi, misalnya kasus penculikan dan pembunuhan Marsinah. Tokoh buruh wanita yang paling vokal dalam memperjuangkan hak-hak bagi kaumnya.

¹⁸ Tentang permasalahan perburuhan lebih lengkapnya lihat, Bagong Suyanto, dkk, *op.cit.*, h. 40-51.

¹⁹ Eep Saefulloh Fatah, *op.cit.*, h. 191.

pertahun dari tahun 1967 hingga 1997.²⁰ Investasi modal asing maupun dalam negeri juga meningkat pesat. Pendek kata pertumbuhan materiel meningkat pesat seiring retorika-retorika pembangunan yang dicanangkan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang sedemikian pesat mengakibatkan pemerintah RI di tahun 1990-an mendapat pujian dari berbagai institusi & media internasional dan dari banyak negara maju maupun berkembang. Laporan ekonom profesional dari World Bank 19 Juni 1997 mengatakan bahwa awal milenium yang akan datang Indonesia akan menjadi salah satu dari 20 negara yang ekonominya terbesar/terkuat didunia.

Fakta yang kontroversil dan kontradiktif dengan penghargaan dan pujian diatas adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak mampu mengatasi masalah pengadaan pangan minimum untuk menghindari terjadinya kelaparan. Sejak Juli 1997 sedikitnya 500 orang di 5 kabupaten di Irian Jaya meninggal karena kekurangan pangan. Selain itu di Sumsel, NTT, Kalteng bahkan Jateng diberitakan bahwa didaerah tersebut terdapat banyak orang yang menderita kelaparan.

Pertumbuhan ekonomi yang dipuji lembaga-lembaga ekonomi internasional bukannya tidak memakan ongkos atau bahkan korban pembangunan. Hutang luar negeri Indonesia pada tahun 1967 berjumlah US\$ 2,3 milyar sedangkan di tahun 1997 berjumlah US\$ 145 milyar.²¹ Hutang luar negeri Indonesia tumbuh rata rata 14% pertahun atau 2 kali lebih cepat

²⁰ Priyanto, *Kontroversi Pembangunan Orde Baru*, dalam: <http://www.oocities.org//apii-berlin/kontro.html> (diakses: 20 November 2010)

²¹ Dr. Jeffrie Winters seorang ahli ekonomi yang pernah bekerja untuk World Bank di Indonesia mengatakan bahwa korupsi dana hutang yang diberikan World Bank pada pemerintah RI mencapai 30%. Priyanto, *op.cit.*

dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pada periode 1980-an, lebih dari separuh ekspor Indonesia terdiri dari hasil bumi: migas, barang-barang tambang, karet, kopi teh dan berbagai hasil hutan seperti kayu lapis, rotan, serta kayu olahan lainnya yang proses eksploitasi dan pengolahannya menyebabkan kerusakan hingga kebakaran hutan hampir 1 juta ha,²² dan imbasnya yaitu 10 orang telah meninggal dunia karena sesak napas dan sekitar 22 juta orang mengalami gangguan saluran pernapasan.²³

Dalam ranah industri, proses peningkatan peran sektor industri yang menggantikan sektor pertanian dalam proses pembangunan menyebabkan terusirnya petani kecil dari desa dan berkurangnya lahan pertanian sampai 1 juta ha. Proyek ini dilaksanakan untuk membangun pabrik demi industrialisasi dan westernisasi gaya hidup yang misalnya; pembangunan real estate, super market, mall, villa, hotel dan lapangan golf bergaya barat.²⁴ Terlihat bentuk kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru bernilai kontradiktif, dimana dalam proses implementasi kebijakannya selalu mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya.

Kebijaksanaan pembangunan yang sedemikian, dimana kegiatan investasi banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan Jawa yang lebih dominan terkonsentrasi di Jabotabek telah menimbulkan kesenjangan antara kota-desa,

²² Menteri Lingkungan hidup Sarwono Kusumaatmadja mengatakan bahwa 81% terbakarnya hutan diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan besar milik swasta dan para pemegang HPH. (Proyek ini sebagian besar diakibatkan oleh praktek bisnis konglomerat pemegang Hak Pengusahaan Hutan kerusakan)

²³ ACADEMIC FREEDOM IN INDONESIA, Dismantling Soeharto Era Barriers, www.hrw.org (diakses: Maret 2011)

²⁴ 1983-1993 lahan persawahan dan ladang yang diolah petani berkurang sebanyak hampir 1 juta ha dari 6,7 juta ha menjadi 5,8 juta ha. BPS, *Statistik 50 Tahun Indonesia Merdeka, buku II*, Jakarta: 1995, h. 206.

Jawa-luar Jawa, sektor industri vs. pertanian dan konglomerat vs. pengusaha kecil.²⁵ Bapenas pernah mengumumkan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di tahun 1993 menurun menjadi hanya 27 juta jiwa atau hanya 14% saja. Kedengarannya hebat tetapi sayang tolok ukur garis kemiskinan yang diambil sangat rendah, yaitu penduduk dengan tingkat konsumsi tidak lebih dari Rp. 20.000/bulan. Jika batas garis kemiskinan diambil dari Kebutuhan Fisik Minimum yang dikeluarkan oleh Depnaker 1993, yaitu Rp.80.000,-/bulan, maka tidak kurang dari 90% atau sekitar 180 juta jiwa masih hidup dibawah garis kemiskinan.²⁶

Pola pengembangan kota yang cenderung terpusat pada pembangunan fisik bukan hanya menyebabkan kelompok marjinal kota semakin terdesak ke daerah pinggiran atau pemukiman kumuh. Kota yang tidak ramah kian teras tidak ramah pada warga miskin. Pembebasan tanah, penggusuran pedagang kaki lima, dan perlakuan yang diskriminatif terhadap sektor informal adalah cermin nyata betapa pembangunan kota yang berlangsung cepat ternyata tidak pernah berpihak pada kaum yang lemah.

Pembangunan wilayah perkotaan yang terlalu menggebu-gebu pada dasarnya selalu menimbulkan tragedi bahwa masyarakat miskinlah yang selalu menjadi korban dan menanggung dampak pembangunan. Di kota-kota besar di Indonesia jumlah penduduk miskin selalu menjadi mayoritas, tetapi

²⁵ Pada tahun 1993 perusahaan yang total assetnya berjumlah lebih dari Rp. 1 triliun,- berjumlah 24 sedangkan tahun 1995 jumlah tsb. meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 67 perusahaan. Nilai asset mereka dalam waktu hanya 2 tahun meningkat hampir 4 kali lipat dari Rp. 72 triliun,- (26% dari Pendapatan Nasional) pada tahun 1993 menjadi pada tahun 1995 nilai asset tsb berjumlah Rp. 272,8 triliun,- atau 83% dari Pendapatan Nasional, lihat: Pusat Data Bisnis Indonesia, *Conglomeration Indonesia*, Jakarta:1997.

²⁶ Lihat: Biro Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 1995*, Jakarta: 1996, h. 540.

mereka justru merupakan kelompok yang acap kali menjadi korban karena paling tidak berdaya menghadapi laju arus pembangunan kota yang terlalu liar.²⁷

B. Sketsa Gerakan Mahasiswa Era 1990-an

Kedudukan kekuasaan Orde Baru pada pertengahan tahun 1980-an, nampaknya mengalami puncaknya. Konstruksi politik yang dibangun oleh Orde Baru mengalami keberhasilan sebagai hasil kooptasi terhadap semua sendi-sendi masyarakat dan bangsa. Salah satunya yaitu mahasiswa, sebagai salah satu elemen kelas masyarakat yang paling kritis dalam wacana-wacana politik. Berbagai bentuk hasil konsolidasi penguasa yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan terkait hubungannya dengan kampus dan mahasiswa, diberlakukan agar mampu meredam segala aktivitas kritisisme mahasiswa.

Kombinasi pendekatan keamanan dan pembinaan organisasi mahasiswa intra universitas dan intervensi sistem perkuliahan di kampus, pada aktualisasinya saat itu benar-benar melumpuhkan aktivitas politik mahasiswa dalam waktu yang relatif lama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru pasca peristiwa Malari, dalam rangka menjauhkan pemuda dan mahasiswa dari wacana politik, pada akhirnya mencapai keberhasilan.

NKK/BKK yang merupakan elemen utama dalam membangun otoritarianisme pemerintah dalam wacana gerakan mahasiswa, secara nyata

²⁷Bagong Suyanto, dkk, *op.cit.*, h. 24.

mampu memukul gerakan mahasiswa. Hal tersebut dilakukan sebagai metode meredam gerakan mahasiswa yang memuncak pada tahun 1974 yang berimbas pada kerusuhan massal di Jakarta.

1. Kilas Balik NKK/BKK

Pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) dalam rangka menata ulang kehidupan kampus secara mendasar, fungsional dan bertahap menjadi konsekuensi yang paling pahit dirasakan oleh para mahasiswa pasca gerakan moral mahasiswa 1977/1978. Kebijakan ini merupakan reaksi pemerintah dalam upaya memformulasikan segala cara untuk membatasi partisipasi mahasiswa dalam dunia politik praktis. Pemerintah Orde Baru melakukan intervensi dalam kehidupan kampus dengan dalih stabilitas ekonomi dan politik demi tercapainya retorika pembangunan. Intervensi dilakukan dengan jalur birokrasi maupun pembenahan politik yang melibatkan unsur-unsur kehidupan kampus.

Secara konsep kebijakan NKK/BKK menjadikan aktivitas mahasiswa mengalami depolitisasi dimana terjadi pemisahan antara wacana politik dan politik praktis. Menurut bahasa konsep depolitisasi, mahasiswa dilarang berpolitik praktis kecuali diluar kampus. Sementara politik yang dimungkinkan berkembang di kampus hanya politik dalam arti ide, teori dan konsep. Artinya menurut konsep tersebut, jika mahasiswa ingin berpolitik (politik dalam arti praktis seperti aksi protes terhadap penguasa) maka harus

melepaskan predikat kemahasiswaannya, sehingga apa yang dilakukan merupakan penampilan mahasiswa dalam predikat sosial lain sebagai pemuda.²⁸

Sedangkan penerapan kebijakan NKK/BKK secara implisit dapat dilihat sebagai upaya untuk menjauhkan peran mahasiswa untuk berpartisipasi dalam arena politik praktis. Sasaran makro yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan ini dengan melakukan berbagai pembatasan yang bertujuan untuk mengebiri sistem perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswa bergolak. Dewan Mahasiswa yang menjadi basis pergerakan mahasiswa pada level intra kampus dibekukan dan hanya diijinkan dalam pembentukan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas) dan (Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas). Selain itu diberikan wewenang kekuasaan kepada Rektor dan Pembantu Rektor yang merupakan penguasa tertinggi di wilayah kampus untuk menjadikan mahasiswa tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan aktivitasnya di level universitas.

Kebijakan NKK/BKK secara murni diterapkan di kampus hanya pada fase awal Prof. Daoed Joesoef ketika menjabat sebagai Mendikbud. Konsep NKK/BKK mengalami pergeseran setelah tampilnya Prof. Nugroho Notosusanto sebagai Mendikbud baru menggantikan Daoed Joesoef pada tahun 1983. Dalam menangani permasalahan dunia kemahasiswaan Nugroho Notosusanto membawa konsep tersendiri, yaitu Konsep Wawasan

²⁸ Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti, Sketsa Pergolakan Mahasiswa dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1988)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 94.

Almamater yang menginginkan Universitas tampil sebagai lembaga Institusionalisasi, Profesionalisasi, dan Transpolitisasi.²⁹

Pada masa Mendikbud Nugroho Notosusanto, kebijakan NKK/BKK mengalami pengenduran dalam implementasinya di kampus. Ia memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan NKK/BKK dengan menyerahkan kebebasan kepada pimpinan universitas dalam rangka membina mahasiswa sesuai dengan situasi kebutuhan masing-masing kampus.³⁰ Meskipun Nugroho terkesan memberikan kebebasan dalam penerapan NKK/BKK, namun konsep wawasan almamater Nugroho sebagaimana konsep Daed Joesoef tetap menjadikan mahasiswa dipasung untuk tidak melakukan aktivitas politik selain diluar kampus. Sedangkan universitas diharapkan hanya berkonsentrasi untuk memberikan pendidikan politik kepada Civitas Akademika yang termasuk mahasiswa agar memiliki kesadaran politik sesuai kepentingan penguasa.

Akan tetapi, diluar dari bagaimana esensi dan pengimplementasian dari kebijakan NKK/BKK tersebut, pada akhirnya hal ini efektif meredupkan gejolak dinamika gerakan mahasiswa. Dalam perkembangan pemberlakuan kebijakan NKK/BKK, sering terjadi oknum birokrat kampus yang bertindak semena-mena dalam menanggapi dinamika kehidupan kampus. Oknum tersebut tidak memandang bahwa eksistensi gerakan mahasiswa sebagai cikal bakal intelektual di masa depan.

²⁹ Nugroho Notosusanto, *Menegakan Wawasan Almamater*, Jakarta: UI Press, 1983.

³⁰ Eva Riana, *"Dinamika Gerakan Mahasiswa IKIP Jakarta tahun 1990-1998"*, SKRIPSI, Jakarta: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2009, h. 30.

Aktivitas mahasiswa di kampus sering direspons dengan sanksi-sanksi akademis. Mahasiswa yang melancarkan aksi-aksi kritik dan protes sering dipandang sebagai mahasiswa *subversif* yang didakwa telah menimbulkan gejolak di kampus. Hukuman berupa sanksi akademis terkadang masih diragukan relevansinya dengan aktivitas mahasiswa yang bersangkutan. Bagi mahasiswa, sanksi akademis tersebut dinilai sebagai bentuk penindasan dan pengebirian terhadap kebebasan berpikir, berpendapat dan bertindak.³¹ Dengan demikian, sanksi akademis juga dipandang sebagai rem yang efektif untuk meredupkan daya kritis dan vokalitas mahasiswa.

Hal lain yang menjadi persoalan bagi perkembangan gerakan mahasiswa era 1990-an adalah seputar dijadikannya kampus sebagai ajang bisnis oleh oknum birokrat kampus. Kampus pada akhirnya tidak berbeda dengan barang komoditi pada umumnya, sehingga berimbas pada kualitas muatan akademis mahasiswa. Demi keberlangsungan keadaan tersebut, oknum birokrat kampus sering memiliki akses perlindungan yang kuat dari institusi berwenang. Akses itulah yang memungkinkan birokrat kampus untuk mengundang keterlibatan pihak militer yang atas nama demi menjaga stabilitas kampus.³² Hal ini karena pihak birokrat mengklaim bahwa tindakan mahasiswa dengan aksinya telah menjurus ke arah tindakan kriminal dan oleh karenanya perlu penyelesaian hukum.

³¹ Bagong Suyanto, dkk, *op.cit.*, h. 75

³² *Ibid.*, h. 81.

2. Gerakan Mahasiswa 1990-an

Seperti yang telah disinggung pada tulisan sebelumnya, dominasi negara Orde Baru dalam kehidupan bernegara terutama pada periode 1980-an telah terjadi pergeseran dalam struktur ekonomi dan politik. Retorika-retorika pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah membuahkan kontrol sosial dan politik yang ketat dan cenderung represif. Demi keberhasilan serta kelancaran proses pembangunan, kestabilan politik dipulihkan dan birokrasi diperketat. Kondisi tersebut oleh para mahasiswa disebut sebagai Pembangunanisme,³³ karena hanya berorientasi pada pembangunan fisik saja, sedangkan hak-hak politik rakyat diabaikan. Sebagai pengimplementasiannya, ditingkat politik makro berlangsung penjarahan politik secara besar-besaran oleh pemerintah Orde Baru untuk menyingkirkan rival-rival politiknya.

Dinamika kehidupan kegiatan kemahasiswaan selama periode tersebut tidak berbeda jauh dengan konstelasi politik nasional yang berada dibawah hegemoni Negara. Sejak pembekuan Dewan Mahasiswa dan pemberlakuan konsep NKK/BKK yang lebih cenderung bermuatan politis ketimbang akademis, proses penertiban terhadap daya kritis mahasiswa dan unsur-unsur gerakan mahasiswa tidak mengalami hambatan yang signifikan.

³³ Ini tercermin bahwa kehidupan politik Indonesia pada era Orde Baru sangat didominasi oleh Negara, dimana keberadaan kaum kapitalis pribumi dianggap sangat penting. Hal ini karena kaum kapitalis merupakan kelas yang memperoleh *privilese* akibat kepemilikan modal dan hubungan erat dengan birokrasi. Selain kaum kapitalis, militer merupakan aktor yang berperan dalam praktek otoritarianisme OB. Jadi bukan rahasia lagi bahwa terdapat kerjasama antara kaum kapitalis, elite lokal, serta birokrat militer setempat. Wacana lebih lengkap lihat, Richard Robinson, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sidney, Australia: Allen and Unwin, 1986.

Ketidakberdayaan lembaga-lembaga formal kampus dan ketidakmampuan organisasi-organisasi intra kampus dalam memfasilitasi daya kritis mahasiswa membuat sebagian mahasiswa yang sadar politik menjadi frustrasi. Menjelang pertengahan tahun 1980-an protes mahasiswa masih terbilang langka. Selama periode ini banyak bermunculan berbagai kelompok alternatif diluar organisasi mahasiswa formal. Kelompok-kelompok ini muncul karena organisasi formal tidak mampu menarik minat mahasiswa untuk terlibat secara aktif, sedangkan kelompok-kelompok baru ini mampu untuk mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa yang sadar politik.

Dalam periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an, para mahasiswa yang memilih terjun dalam aktivitas diluar kampus, mengembangkan sendiri bentuk-bentuk organisasinya. Diawali oleh kelompok-kelompok kecil seperti, Kelompok Diskusi atau Kelompok Studi (KS) dan Lembaga Pers Mahasiswa. Aktivitas mahasiswa pun terjadi secara dialektis, yang kemudian berkembang menjadi komite-komite aksi dan advokasi dimana para aktivis gerakan mahasiswa inilah yang kemudian menjadi fasilitator bagi kaum buruh, petani, dan elemen masyarakat lainnya.

Di tempat lain, ada pula aktivis mahasiswa yang memilih bergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM sebagai salah satu wadah bagi para aktivis gerakan mahasiswa era 1990-an tidak akan dibahas dalam penulisan ini, karena perlu kajian tersendiri dalam substansinya. Namun terlepas dari itu, hal penting yang harus dipahami adalah bahwa bentuk-bentuk organisasi gerakan mahasiswa ini tidak sepenuhnya mengambil

tempat sebuah universitas atau perguruan tinggi. Lebih jauh lagi bahwa berbagai aktivitas mahasiswa tersebut pada akhirnya menciptakan organisasi-organisasi yang lebih luas dalam upaya membentuk sebuah oposisi politik.³⁴

a. Kelompok Studi (KS)

Sejak pemberlakuan NKK/BKK dan penyerbuan militer ke kampus-kampus di tahun 1978, hampir selama satu dasawarsa gerakan mahasiswa mengalami kevakuman. Tanda-tanda bangkitnya kembali gerakan mahasiswa ditandai dengan kemunculan berbagai Kelompok Studi atau lebih dikenal dengan kelompok diskusi (KS) pada periode akhir 1980-an. Kelompok diskusi (KS) didirikan oleh para mahasiswa dengan maksud sebagai arena mengasah kemampuan kritis mahasiswa atas persoalan-persoalan sosial dan politik. KS muncul sebagai akibat ketidakmampuan organisasi mahasiswa formal kampus untuk menyalurkan ide-ide kritis mahasiswa mengenai perubahan sosial.

Adapula yang mendefinisikan KS sebagai suatu bentuk kegiatan sekelompok mahasiswa diluar kampus yang masih tetap mempertahankan posisi mahasiswa sebagai pelaku utama dan sekaligus kelompok sasaran yang dituju, dengan penekanan pada intelektualisme, khususnya pengkajian pada masalah-masalah teoritis.³⁵

³⁴ Irine H. Gayatri, *Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993* dalam, Muridan S Widjoyo, dkk, *Penakluk Orde Baru: Gerakan Mahasiswa '98*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 65.

³⁵ Wawancara dengan I Gusti Anom (Kepala Departemen Agitasi dan Propaganda PRD periode 1996-1999) pada Juli 2010.

Adapun topik-topik yang biasa dikaji dalam KS-KS pada waktu itu yaitu berkisar pada kritik-kritik sosial terhadap kapitalisme, kajian teologis, isu-isu global, perubahan sosial dan persoalan-persoalan kerakyatan akibat pembangunan Orde Baru. Pemikiran-pemikiran kritis karya Karl Marx, Paolo Freire, Ivan Illich, Jurgen Habermas, Michael Foucault juga dikaji oleh para aktivis KS ini.

Beberapa KS yang muncul di kota-kota besar pada era tersebut antara lain di Jakarta (*KS Proklamasi, KS Indonesia, KS Lingkar Studi Indonesia, dan KS Pena*), di Bandung (*KS Thesa dan KS Free School for Sosio Analysis*), di Yogyakarta (*KS Palasan, KS Teknosofi, KS Girli, dan KS F-16*), dan Surabaya (*KS Surabaya dan KS Analisis Sosial*).³⁶ Para peserta KS tersebut tidak terbatas pada satu perguruan tinggi saja, bahkan forum diskusi yang digelar oleh beberapa KS kemudian berinteraksi dengan para aktivis mahasiswa yang tidak puas melakukan konstruk sosial hanya dengan berdiskusi.

Dari pertumbuhan beberapa KS di kota-kota besar tersebut dapat dilihat perbedaan format gerakan mahasiswa era 1990-an dengan gerakan mahasiswa sebelumnya. Gerakan mahasiswa era sebelumnya cenderung bersifat sporadis dan reaktif, sedangkan era 1990-an telah terorganisir dengan baik dan bersifat ideologis.

Dalam konteks KS ini, tujuan berubah menjadi pembentukan opini politik masyarakat luas. Aksi massa diubah menjadi aksi informasi, dimana

³⁶ Irine H. Gayatri, *Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993*, dalam Muridan S Widjoyo, dkk, *Op.cit.*, h. 78.

para aktivis KS ini melakukan gerakan penyadaran terhadap masyarakat luas. Kemunculan KS ini merupakan penanda awal kebangkitan kembali gerakan mahasiswa yang telah lama redup. Dalam pengaruh adanya NKK/BKK, hampir tak mungkin melakukan aksi massa sebagai bentuk penyaluran kritik sosial. Dengan demikian, gerakan intelektual melalui KS dengan topik yang membahas realitas kehidupan sehari-hari adalah hal yang paling mungkin dilakukan.³⁷

Namun di sisi lain, keberadaan KS ini oleh sebagian mahasiswa dipandang cenderung elitis karena hanya berkuat pada kajian teoritis belaka, sehingga diprediksi tidak mampu berorientasi pada sebuah gerakan massa. Hal ini karena format yang dipilih KS tersebut hanya terbatas pada upaya untuk menyasiasi kondisi dan koenstelasi politik nasional yang notabene represif terhadap berbagai aktivitas serta gerakan mahasiswa sejak pertengahan 1970-an.

Salah satu contoh kasus terkait eksistensi KS ini yaitu pada aksi demonstrasi di Yogyakarta pada tahun 1989. Aksi tersebut mengangkat isu-isu tindakan kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil. Di hal lain, Ada wacana bahwa aksi tersebut ditunggangi dan dikoordinir oleh para aktivis KS. Wacana ini memicu perdebatan antara aktivis kelompok aksi dengan aktivis KS yang kemudian dimuat di media massa.³⁸

³⁷ *Ibid.*, h. 80-81.

³⁸ Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Kemunculan KS dan kelompok aksi dalam wacana yang tidak sejalan terkadang menjadi pemicu konflik bagi gerakan mahasiswa pada era 1990-an ini. Nilai lebih bagi KS mungkin pada titik ideologisnya. Studi teoritis yang dikaji mendalam meningkatkan tingkat akademik dari daya kritis mahasiswa sekaligus membuka wacana baru dari para teoritis dan teori-teori baru yang akhirnya dikenal lebih luas dalam gerakan protes selanjutnya.

Kebutuhan para aktivis gerakan mahasiswa untuk mewedahi daya kritis mahasiswa terhadap akumulasi persoalan struktural dan kristalisasi kesadaran pada problem sosial politik ternyata tidak dapat terpenuhi hanya dalam format KS. Hal ini selanjutnya memunculkan otokritik dikalangan gerakan mahasiswa yang kemudian memicu upaya pemikiran tentang strategi alternatif dikalangan aktivis mahasiswa dengan aksi yang lebih kongkret.

b. Pers Mahasiswa

Selain KS, salah satu wadah alternatif yang dijadikan sebagai sarana penyaluran aktivitas kritis mahasiswa adalah Pers Mahasiswa (Persemawa). Persemawa pada eksistensinya mempunyai peran penting dalam meningkatkan pemikiran kritis-konseptual di kalangan mahasiswa dan karenanya juga banyak berperan dalam memulai dan terutama mengorganisir protes-protes selama periode awal 1990-an.

Para aktivis persemawa menganggap realitas yang dikemukakan lewat terbitan-terbitannya merupakan upaya untuk menghilangkan sekat yang membuat mahasiswa menjadi golongan elit yang terpisah dari masyarakat.

Persoalan-persoalan demokratisasi, HAM, politik, ekonomi, sosial dan budaya merupakan tema-tema tulisan yang diangkat persmawa, dengan maksud memberikan sumbangan pemikiran kritis bagi kalangan mahasiswa itu sendiri maupun masyarakat luas.

Persmawa dalam perkembangannya juga sempat mengalami pasang surut sebagai akibat represifitas pemerintah Orde Baru.³⁹ Pengekangan terhadap persmawa tertuang dalam Permenpen RI No.01/Per/Menpen/1975, yang substansinya menyatakan bahwa Persmawa digolongkan sebagai penerbitan khusus yang bersifat non-pers. Ada pula Surat Edaran Dikti No.849/D/T/1989 mengenai penerbitan kampus di perguruan tinggi.

Melalui peraturan tersebut, peran pers mahasiswa (persmawa) dihilangkan begitu saja. Persmawa tidak leluasa menuliskan hal-hal di luar akademis kampus. Padahal, keberadaan persmawa sendiri dimaksudkan sebagai media alternatif saluran kritis mahasiswa dalam menyikapi isu-isu sosial dan politik. Lebih jauh lagi bahwa persmawa pada esensinya diharapkan mampu membangkitkan kembali nilai-nilai humanistik dengan orientasi penyadaran melalui kritik ideologi, yang mampu menempatkan dirinya dalam konflik antara realitas empirik dengan ide-ide.⁴⁰

Pada era 1990-an, tercatat beberapa terbitan pers mahasiswa mengalami pembreidelan, diantaranya yaitu pers kampus IAIN Sunan Kalijaga, ARENA, pers majalah Opini Fisip Undip, majalah Dialogue Fisip

³⁹ Catatan mengenai represifitas Orde Baru terhadap Persmawa lihat, Didik Supriyanto, *ibid.*, h. 112-119.

⁴⁰ Irine H. Gayatri, *Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993*, dalam Muridan S Widjoyo, dkk, *Op.cit.*, h. 84.

Unair, majalah Vokal IKIP PGRI Semarang. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa tidak adanya kebebasan mengemukakan pendapat bahkan ironisnya terjadi di lingkungan kampus sendiri.⁴¹ Dan tidak mengherankan pula jika membandingkan pembredelan pers mahasiswa dengan pers umum, karena dua elemen pers tersebut sama-sama merupakan sosok yang menakutkan bagi Orde Baru.

Di hal lain, aktivis persmawa pun pada akhirnya tidak tinggal diam melihat kebijakan represif terhadap media mereka. Tercatat ada beberapa aksi solidaritas terhadap pembredelan majalah Arena milik IAIN Sunan Kalijaga sepanjang tanggal 7-17 Juni 1993. Lalu pada tanggal 26 Juni 1993, Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Semarang melakukan aksi bertema “Aksi Keprihatinan Pembredelan Pers Mahasiswa”. Aksi tersebut dilakukan dalam bentuk kemah keprihatinan di lapangan basket Undip Semarang, yang diikuti beberapa aktivis persmawa dari perwakilan PTN dan PTS di Semarang. Aksi juga diselengi dengan diskusi tentang eksistensi persmawa.⁴²

c. Komite Aksi dan Advokasi

Seiring makin menjamurnya kelompok-kelompok studi (KS) dan Persmawa, muncul konsolidasi oleh para aktivis KS dan persmawa dalam wacana alternatif membangun kekuatan gerakan melalui format aliansi. Ini didasari oleh pemahaman pada konteks perjuangan untuk menegakan demokrasi yang sudah menemukan momentumnya. Target yang hendak

⁴¹ *Balairung*, No.25/Th.XII/1997.

⁴² *Ibid.*

dicapai dengan melakukan aliansi ini adalah bertambahnya kemampuan untuk melakukan tawar-menawar antara masyarakat dengan pemerintah.

Para aktivis tersebut menganggap bahwa arena politik 1990-an merupakan tempat pergulatan politik langsung dan riil dari pelaksanaan kata-kata. Isu-isu populis (advokasi persoalan tanah, perburuhan, dan kesenjangan sosial) hingga struktural (tuntutan terhadap pemerintah) menandai lembaran perjalanan gerakan prodemokrasi kala itu.⁴³ Bagi para aktivis, kesadaran untuk mentransformasikan bahwa perlawanan merupakan milik semua elemen masyarakat sudah mendapat tempat, meskipun masih diperlukan kesabaran.⁴⁴

Di luar kampus, karena *scope* gerakan yang sudah mulai meluas, aliansi juga dibangun dengan kelompok-kelompok mahasiswa lain yang berpotensi untuk membuat perubahan mulai diintensifkan, terutama dengan wadah-wadah komunikasi antar kota. Wadah-wadah tersebut masing-masing berisikan elemen-elemen aktivis dari beragam perguruan tinggi di kota masing-masing.

Wadah-wadah komunikasi tersebut pada perkembangannya mulai membangun aliansi dengan kelompok-kelompok KS dan Persmawa untuk bersama-sama mendiskusikan program-program lanjutan yang berupa memperkuat basis massa dalam aktivitas advokasi dalam bentuk komite-komite aksi.

⁴³ Wawancara dengan Agus Jabo (Ketum PRD periode 2011-2015, mantan aktivis SMID) di KPP-PRD, Jakarta.

⁴⁴ Agus Jabo, *ibid.*

Di Yogyakarta misalnya, sinergisasi antara Kelompok Studi (KS) dan Pers Mahasiswa (Persemawa) menghasilkan Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta (FKMY) di akhir periode 1980-an. Namun pada perkembangannya organ ini pecah karena perbedaan dan konflik antara para aktivisnya. Perpecahan FKMY melahirkan Dewan Mahasiswa dan Pemuda Yogyakarta (DMPY) dan Solidaritas Mahasiswa Yogyakarta (SMY).⁴⁵ Perpecahan dan polarisasi organ mahasiswa tersebut ternyata tidak menjadikan gerakan menjadi macet, melainkan malah menjadi batu pijakan dinamika gerakan mahasiswa selanjutnya yang berbentuk komite-komite aksi.

Berangkat dari fenomena tersebut, komite-komite aksi pun mulai muncul dan mengalami pertumbuhan yang luar biasa di periode awal 1990-an. Para aktivis yang tergabung dalam komite-komite aksi tersebut yang kemudian melakukan aksi-aksi protes yang didasari atas isu-isu tertentu. Komite-komite aksi tersebut diberi nama sesuai dengan isu-isu politik yang diangkat.

Hal inilah yang menjadikan gerakan mahasiswa 1990-an mempunyai karakteristik lain, yaitu kerja-kerja politik yang dilakukan merupakan aliansi dengan kelompok-kelompok marginal seperti buruh, petani, dan elemen masyarakat lainnya. Mahasiswa pun menjadi pendamping sekaligus fasilitator

⁴⁵ DMPY menojol dengan gaya parlemen jalanan dan empirisme yang didominasi oleh watak gerakan LSM yang kongkret dan praktis. Sedangkan SMY menonjol dengan wacana-wacana teoritis ideologis kuat yang merupakan watak khas dari KS dan Persemawa. Wawancara dengan Andi Arif (mantan aktivis SMID).

rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya yang ditindas oleh pemerintah Orde Baru.

3. Pembangunan Perlawanan terhadap Rejim

Berbagai macam bentuk represi Orde Baru di bawah komando Presiden Soeharto membenarkan kenyataan bahwa semakin luas penindasan, semakin luas pula perlawanan yang diberikan. Rakyat Indonesia mulai bangkit untuk menuntut hak-hak ekonomi dan politiknya. Gerakan mahasiswa muncul sebagai motor perlawanan politik dengan kemunculan berbagai komite aksi di berbagai tempat. Kaum tani di Kedung Ombo, Cilacap dan lainnya bangkit dengan cara demonstrasi melawan penggusuran tanah. Kaum buruh di berbagai kawasan industri mulai bangkit dengan berbagai pemogokan dan demonstrasi. Demikian pula sektor-sektor masyarakat lain yang sudah muncul keberanian membangun tradisi perlawanan.

Beberapa kelompok gerakan mahasiswa dari berbagai komite-komite aksi memandang bahwa penyatuan perlawanan gerakan mahasiswa dan keberpihakan pada rakyat harus menjadi strategi-taktik dan program perjuangan demokrasi. Organ-organ gerakan mahasiswa yang kemudian sepakat untuk bersinergi saat itu antara lain; Ikatan Mahasiswa Solo (IMS),

Solidaritas Mahasiswa Salatiga (SMST), Solidaritas Mahasiswa Semarang (SMS) dan Solidaritas Mahasiswa Jakarta (SMJ).⁴⁶

Kelima organisasi mahasiswa tersebut menyepakati untuk mendirikan sebuah organisasi mahasiswa yang bersifat aliansi antar kota yang kemudian membangun Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) pada bulan November 1992 secara semi-legal. Namun SMID secara formal kemudian dideklarasikan sebagai sebuah organisasi legal dan terbuka pada 3 Agustus 1994.

Berdirinya SMID merepresentasikan suatu gerakan mahasiswa yang mempunyai ideologi dan gagasan sosial demokrasi kerakyatan dalam program-program kerja politiknya. SMID dalam strategi-taktiknya berkesimpulan bahwa sudah saatnya untuk memajukan gerakan mahasiswa menjadi gerakan rakyat. Kerja-kerja politik menentang kediktatoran Orde Baru harus menjadi perjuangan rakyat yang terorganisir. Dari sini dimulailah tahap pembelajaran dan perjuangan bersama rakyat sebagai aktualisasi gerakan mahasiswa.⁴⁷

SMID pun berkembang dan membangun organ nasional gerakan mahasiswa yang menganut sentralisme demokratik. Organ gerakan mahasiswa ini dengan sangat cepat dan secara agresif melebarkan sayapnya ke luar berbagai kota di Indonesia. Wacana gerakan dibangun melalui pendekatan struktural konflik, baik itu Marhaenisme, Materialisme-

⁴⁶ Irine H. Gayatri, *Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993*, dalam Muridan S Widjoyo, dkk, *Op.cit.*, h. 93.

⁴⁷ Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, (Jakarta: tidak diterbitkan, 1999), h. 16.

Dialektika-Logika (Madilog Tan Malaka) dan hingga Marxisme-Leninisme.⁴⁸

Wacana tersebut dianggap dapat merefleksikan terhadap problem struktur yang dihadapi rakyat. Ideologi, strategi dan taktik, organisasi, dan program disusun secara eksplisit dan disosialisasikan secara terbuka.

Dalam konstelasi dan peta politik Orde Baru pada era 1990-an, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) merupakan organisasi mahasiswa yang paling sering tercuat. Organisasi ini menjadi catatan penting karena memiliki program-program pergerakan dan perjuangan yang progresif serta memiliki basis massa atau anggota yang radikal.

Terdapat dua alasan penting yang mendasari terbentuknya organisasi ini. *Pertama*, para penandatangan sepakat bahwa mereka memerlukan sebuah wadah organisasi yang lebih tinggi untuk menjalankan program-program bersama dalam pergerakan mahasiswa. *Kedua*, kelemahan mendasar dari gerakan politik di Indonesia adalah bahwa ia tidak mendapat dukungan dari internasional. Organisasi SMID memiliki tujuan yang diantaranya ;⁴⁹

1. Menyatukan mahasiswa dan gerakan mahasiswa melawan rezim fasis Soeharto.
2. Mengkampanyekan dan memperjuangkan *Civil Liberties*, kebebasan berbicara, berorganisasi, pers, akademik, demonstrasi, aksi mogok, mengajukan petisi, mencabut Undang-undang

⁴⁸ Irine H. Gayatri, *Arah Baru Perlawanan Gerakan Mahasiswa 1989-1993*, dalam Muridan S Widjono, dkk, *Op.cit.*, h. 94.

⁴⁹ Dokumen Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, 1993, dalam Suharsih dan Ign K Mahendra, *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Resist Book, 2007), h. 93.

Subversif, mencabut Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan, Bakortanas, dll.

3. Bersama gerakan buruh dan tani mengkampanyekan dan memperjuangkan sistem multi partai di Indonesia.
4. Memperjuangkan sistem pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis, organisasi mahasiswa yang bebas, SPP yang murah bagi PTN dan PTS dan pers mahasiswa yang bebas sensor.
5. Aktif dalam menyokong solidaritas internasional dalam menentang imperialisme.

Karena itulah, begitu dalam pendiriannya, aktivis SMID langsung melakukan pengorganisasian rakyat di dua sektor yang sedang bangkit melawan dimana-mana, yakni kaum buruh dan tani. Inilah tahap awal perkenalan politik mahasiswa dengan rakyat untuk mencari suatu bentuk perjuangan melawan penindasan. Anggota-anggota terbaik SMID adalah anggota-anggota yang rendah hati, saling belajar bersama rakyat, lalu menyerap kekuatan dan cita-cita mereka menjadi aksi-aksi perlawanan menuntut perubahan.⁵⁰

Dalam perkembangannya, para aktivis SMID ini menerbitkan majalah/buletin organisasi PROGRES sebagai alat untuk saling belajar politik dan berorganisasi serta berbagi pengalaman kepada seluruh unsur-unsur perlawanan yang sudah mulai tumbuh. PROGRES bukan hanya mampu mengembangkan dan mengelola agen-agen distribusi, tapi lebih jauh lagi

⁵⁰ Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), *op.cit.*, h. 17.

mampu memberikan mimbar-mimbar pendidikan dan pengorganisasian. Namun keberadaan PROGRES tak berlangsung lama, karena PROGRES dipandang pemerintah sebagai pemicu perlawanan rakyat. Alhasil, PROGRES pun dilarang beredar oleh pemerintah melalui Kejaksaan Agung.

Di hal lain, Para aktivis SMID melihat bahwa sentimentasi rakyat terhadap kediktatoran pemerintahan Orde Baru makin meluas, yang ditambah sudah tumbuhnya keberanian rakyat untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi sebagai fase awal dalam pembangunan resistensi yang di koordinir SMID, para aktivis gerakan mahasiswa telah mengimplementasikan program-programnya dalam beberapa hal;

Pertama, Mengorganisir berbagai macam aksi massa dalam pergerakan yang lebih luas, yang tujuannya adalah memberikan pengalaman, keberanian, dan kesadaran akan kekuatan diri mereka (*people power*) dalam melakukan perubahan dan perjuangan menuntut hak-hak ekonomi dan politik mereka.

Kedua, Mengorganisir satu media perlawanan yang memberikan panduan perjuangan sekaligus alat untuk membentuk jaringan antar wilayah dan lintas sektor.

Ketiga, Memberikan dan mempropagandakan gagasan kerakyatan pada pelopor perjuangan demokrasi radikal yang dilakukan sekaligus dimotori para mahasiswa.

SMID dalam eksistensi juga pernah mengikuti dan menghadiri Konferensi Asian Student Association (ASA) di New Delhi, India, dan SMID

pun diterima dalam wadah organisasi tersebut. Bagi para aktivis menilai bahwa dengan bergabung dengan ASA, sudah saatnya bagi dunia luar mengetahui akan perjuangan demokrasi mereka di Indonesia.

Seiring berjalannya aktivitas dan kerja organisasi, kerja-kerja politik yang berupa advokasi kasus rakyat pun tetap dijalankan. misalnya pada Januari 1993, SMID melakukan aksi advokasi membela petani Balngguan di Jawa Timur. Dalam aksi tersebut, 18 orang ditangkap dan disiksa oleh Bakorstanasda Kodam Brawijaya. Dari 18 orang yang ditahan, termasuk didalamnya terdapat Budiman Sudjatmiko.